



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Desa Mudik Ulo Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi

Ermi Jusmida

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
Jl. Gatot Subroto KM, 7 Kebun Nenas, Desa Jake, Kab. Kuantan Singingi
Email : tn.ermijusmida@gmail.com@gmail.com

ABSTRAK

Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan dan program pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha masyarakat dalam bentuk bantuan, jaminan, rehabilitas, dan pemberdayaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di desa mudik ulo kecamatan hulu kuantan kabupaten kuantan singingi. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di desa mudik ulo kecamatan hulu kuantan kabupaten kuantan singingi. Teknik penarikan sampel untuk perangkat desa mudik ulo menggunakan teknik sampling jenuh, yaitu semua populasi dijadikan sampel, yang berjumlah 6 orang. Dan untuk masyarakat desa mudik ulo menggunakan teknik random sampling yaitu penagambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu, yang mana jumlah sampel untuk unsur-unsur masyarakat berjumlah 50 orang. Analisis data yang digunakan adalah Deskriptif kuantitatif, yaitu menganalisa data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner. Hasil sebaran kuesioner menunjukkan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan didesa mudik ulo kabupaten kuantan singingi yang menghasilkan nilai rata-rata 170 berarti pada interval Baik, serta observasi dilapangan yang menunjukkan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan didesa mudik ulo kabupaten kuantan singingi sudah berjalan dengan Baik.

Kata kunci : Implementasi, kebijakan

ABSTRACT

Poverty alleviation is a regional government policy and program that is carried out systematically, planned, and in synergy with the community business world in the form of assistance, guarantees, rehabilitation, and empowerment. The purpose of this study was to determine the implementation of poverty reduction policies in the homecoming village of Hulu Kuantan, Kuantan Singingi Regency. The formulation of the problem in this study is how to implement poverty reduction policies in the homecoming village of Ulu subdistrict, Hulu Kuantan district, Kuantan Singingi Regency. The sampling technique for the homecoming ulo village apparatus used a saturated sampling technique, ie all the population was sampled, totaling 6 people. And for the people of the homecoming village of Ulo using a random sampling technique, namely the collection of sample members from the population is carried out randomly without regard to the existing strata in the population, in which the number of samples for community elements is 50 people. Analysis of the data used is descriptive quantitative, namely analyzing the data obtained from the results of distributing questionnaires. The results of the questionnaire show that the implementation of poverty reduction policies in the homecoming village of Kuantan Singingi Regency which produces an average value of 170 means at Good intervals, as well as field observations which show that the implementation of poverty reduction policies in the homecoming village of Kuantan Singingi Regency has been going well.

Keywords : Implementation, policy



Pendahuluan

Politik hukum penanggulangan kemiskinan dalam peraturan perundang-undangan nomor 11 tahun 2009 adapun ketentuan dalam pasal 33,34 dan 27 ayat (2) UUD 1945. tentang kesejahteraan sosial dalam konsideran undang-undang ini menyebutkan bahwa pancasila dan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia, untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat.

Kemiskinan telah menjadi masalah klasik yang tidak kunjung selesai. Berbagai kebijakan pemerintah telah dikeluarkan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Program pengentasan kemiskinan tetaplah menjadi salah satu program prioritas dan strategi lintas bidang di Indonesia. Kebijakan penanggulangan kemiskinan dibagi menjadi dua kluster, yaitu, kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro.

Karakteristik program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga adalah pemenuhan hak dasar utama individu dan rumah tangga miskin yang meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan, pangan, sanitasi, dan air bersih program ini mencakup raskin. Program keluarga harapan, program berbasis pemberdayaan dan jamkesmas didesign dengan menggunakan pendekatan partisipatif, mendorong penguatan kapasitas masyarakat, dan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Penerima manfaat dari program ini adalah kelompok masyarakat yang dikategorikan miskin. Yang termasuk dalam kategori ini adalah PNPM Program berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Karakteristiknya adalah bantuan modal skala mikro, penguatan kemandirian dan akses pasar, dan peningkatan keterampilan serta manajemen usaha. Penerima manfaat adalah kelompok masyarakat hampir miskin yang kegiatan usahanya pada skala mikro dan kecil

Kebijakan penanggulangan kemiskinan diterapkan diseluruh provinsi Riau diindonesi terutama Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu yang mengimplementasikan kebijakan tersebut. Jumlah penduduk miskin daerah kabupaten kuantan singingi. Sebanyak 29,340 jiwa dari total 334 ribu jiwa jumlah penduduk dikabupaten kuantan singingi (Kuansing). Provinsi Riau masih berada dalam garis kemiskinan. Secara umum kondisi masyarakat diindonesia berdasarkan data dari BPS,(2000 : 27-28), Berdasarkan BPS jumlah penduduk miskin sebesar 38,4 juta atau 18,20% dari jumlah penduduk. Angka kematian bayi sebanyak 47 per 1000 kelahiran dan angka harapan hidup laki-laki 63,45 tahun dan perempuan 67,3 tahun.

Dari data BPS Kabupaten Kuantan Singingi mulai tahun 2017 lalu jumlah penduduk miskin mencapai 31.950 jiwa dengan persentase 9.97 persen. Pada 2018 naik menjadi 32.100 jiwa atau 9.92 persen dan pada tahun 2020 kembali turun menjadi 29.340 jiwa atau 8.91 persen.

Pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin di kabupaten kuansing berkurang dari tahun sebelumnya, turunnya jumlah penduduk miskin di kuansing dikarenakan adanya program jaring sosial atau beberapa bantuan sosial. (BPS 2021).

Penduduk miskin tersebar terutama didesa mudik ulo kecamatan hulu kuantan kabupaten kuantan singingi. Kemiskinan di desa mudik ulo paling kecil yaitu sebanyak 234 jiwa orang. Sebenarnya telah banyak program penanggulangan kemiskinan yang telah diimplementasikan



didesa mudik ulo . ada dua program penanggulangan kemiskinan yang pernah dilaksanakan yaitu Program Keluarga Harapan(PKH), Kartu Menuju Sehat (KMS).

Perbaikan pada masalah sektor kesehatan, perbaikan pada masalah sektor pendidikan, perbaikan kualitas jalan dan listrik khususnya perdesaan, membangun lembaga-lembaga kemiskinan mikro yang memberi manfaat pada penduduk miskin, memberikan lebih banyak dana untuk daerah miskin.

Belum teratasinya masalah kemiskinan mendorong pemikiran perlunya sesuatu strategi baru penanggulangan kemiskinan yang lebih menyentuh akar permasalahan kemiskinan yang lebih terpadu. Pandangannya konvensional menyebutkan kemiskinan sebagai kekurangan modal dan menganggap masyarakat miskin sebagai objek yang tidak memiliki informasi dan pemilihan sehingga tidak perlu terlibat dalam pengambilan keputusan kebijakan publik. Implikasi dari pendekatan ini adalah pemerintah mempunyai peran dominan untuk menyediakan modal dan kebutuhan dasar masyarakat miskin. Pendekatan ini terbukti kurang optimal dalam memecahkan masalah kemiskinan bukan hanya disebabkan oleh kesulitan anggaran dan lemahnya rancangan kebijakan, tetapi juga tidak adanya pengakuan dan penghormatan atas suara dan hak-hak dasar masyarakat miskin.

2. Landasan Teori

2.1 Teori /Konsep administrasi Negara

Administrasi dalam arti sempit adalah keseluruhan aktivitas yang bersifat ketatausahaan, yaitu mencakup kegiatan surat-menyurat, mulai dari pencatatan atau agenda surat masuk dan surat keluar, pengetikan, penggandaan, pendistribusian, dan pengarsipan surat, termasuk pencatatan dan pengolahan data informasi yang diperlukan oleh pimpinan dalam rangka penentuan kebijakan dan pengambilan keputusan yang terkait dengan tugas fungsi organisasi.

Administrasi dapat dibedakan menjadi dua yakni, administrasi dalam arti sempit merupakan kegiatan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan tujuan untuk menyediakan keterangan serta memudahkan prosesnya kembali secara keseluruhan dan dalam hubungan satu sama lain atau lebih tepatnya disebut dengan tata usaha. Sedangkan administrasi dalam arti luas merupakan kegiatan kerjasama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja, bagaimana ditentukan dengan struktur dengan mendayagunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Pengertian administrasi dalam arti luas memiliki unsur-unsur kelompok orang, kerjasama, pembagian tugas secara struktur, kegiatan dan proses, tujuan yang akan dicapai, dan pemanfaatan sumber-sumber yang tersedia.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa administrasi Negara merupakan kegiatan yang bersifat penyelenggaraan, yang diselenggarakan oleh paratur pemerintah dari suatu Negara untuk kepentingan umum. Administrasi Negara merupakan suatu bahasa ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan Negara dan etika yang mengatur penyelenggaraan Negara.

2.2 Teori/Konsep Kebijakan

Konsep kebijakan salah satu dimensi pokok dalam ilmu dan praktik administrasi publik. Sebagai salah satu unsur penting dalam administrasi publik, kebijakan dianalogikan fungsinya sama dengan fungsi otak pada tubuh manusia, karena melalui instrument ini, segala aktivitas



kehidupan bernegara dan bermasyarakat melalui dilakukan oleh birokrasi , plus pihak swasta dan masyarakat.

2.3 Teori/Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi kebijakan dari sudut pandang teori siklikal (*cylical theory*) maka implementasi itu diperlukan sebagai suatu tahapan penting yang berlangsung dari proses kebijakan, terutama setelah wacana legal formal, biasanya berupa undang-undang peraturan, ketetapan, atau bentuk-bentuk produk lainnya, dianggap sudah usai.

Dalam arti seluas luas-luasnya implementasi juga sering dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama antara beragam pemangku kepentingan (*stakeholders*), aktor, organisasi (publik atau privat), prosedur, dan teknik secara sinergis yang digerakan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan kearah tertentu yang dikehendaki.

Terdapat berbagai pendapat para ahli dan akademi yang mengemukakan tentang pengertian implementasi. Hal ini perlu dijelaskan agar pemahaman tentang implementasi dapat disinkronisasikan dari konsep penelitian terhadap suatu kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Karena Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan.

2.4 Teori/Konsep Organisasi

Organizing berasal dari kata "*organism*" yang berarti menciptakan struktur dengan bagian-bagian yang diintegrasikan sedemikian rupa, sehingga hubungannya satu sama lain terikat oleh hubungan terhadap keseluruhannya. Organisasi diartikan menggambarkan pola-pola, skema, bagan yang menunjukkan garis-garis perintah, kedudukan karyawan, hubungan-hubungan yang ada dan lain sebagainya.

Organisasi merupakan dua orang atau lebih yang bekerja bersama dengan cara yang terstruktur untuk mencapai suatu tujuan yang khusus atau kumpulan tujuan-tujuan. Masyarakat memerlukan organisasi karena organisasi melayani masyarakat, memungkinkan masyarakat mencapai tujuan yang individual tidak dapat mencapai, memperoleh pengetahuan, dan memberikan karier.

Sedangkan hubungan dalam organisasi adalah pimpinan yang cakap harus memelihara semua hubungan itu secara harmonis, supaya potensi organisasi dimanfaatkan optimal. Tugas menjaga hubungan ini sangat sulit, karena latar belakang karyawan yang heterogen, yang dibawah kedalam organisasi tersebut.

2.5 Konsep Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat disuatu daerah. Kondisi ketidakaampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.

Kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang , tidak mampu memenuhi hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang



bermartabat. Hak-hak dasar masyarakat didesa Mudik ulo antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumshsn , air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara pemahaman utamanya mencakup:

- a. Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
- b. Gambaran-gambaran tentang kebutuhan sosial termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam bermasyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan nformasi keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemsikinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral,dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi.
- c. Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekeyaan memadai, makna memadaidisini sangat berbeda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi.

a) Pertumbuhan Ekonomi

Kenaikan kapasitas dalam jangka panjng dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya yang ditentukan oleh adanya kemajuan atau penyesuain teknologi,institusional dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada (simon Kuznetz dan todaro,2004 : 17).

Kuznet (2001 : 17), pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang.

b) Pengangguran

Pengangguran adalah keadaan ketika seseorang yang tidak bekerja dan yang secara aktif sedang dalam masa mencari pekerjaan selama empat minggu sebelumnya, atau sedang menunggu untuk panggilan kembali dari pekerjaan yang sempat dihentikan, atau sedang menunggu untuk melapor suatu pekerjaan yang baru dalam waktu empat minggu (Dronbusch, 1989 : 27).

c) Jumlah Penduduk

P.Todaro (2000 : 30), menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jumlah angkatan kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga produktif.

d) Tingkat Pendidikan

Menurut simmons (dalam todaro, 1994 : 34), pendidikan dibanyak negara merupakan cara untuk menyelamatkan diri dari kemiskinan, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkatkan sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya.

e) Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup (AHH), dijadikan indikator dalam mengukur kesehatan suatu individu disuatu daerah , angka harapan hidup adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang ditempuh seseorang selama hidup, hubungan angka harapan hidup terhadap kemiskinan adalah dalam membandingkan tingkat kesejahteraan antar kelompok masyarakat sangatlah penting untuk melihat angka harapan hidup. Dinegara yang tingkat kesehatannya lebih baik, setiap individu memiliki rata-rata hidup lebih lama dengan demikian secara ekonomis mempunyai peluang untuk memperoleh pendapatan lebih tinggi.



2.6 Konsep penanggulangan kemiskinan

Program penanggulangan kemiskinan dibagi kedalam tiga kluster yaitu kluster 1, kluster 2, kluster 3. Sasaran dan tujuan yang berbeda meskipun sama-sama untuk menanggulangi kemiskinan.

a. Bantuan sosial terpadu berbasis keluarga

Bertujuan untuk mengurangi beban rumah tangga miskin melalui peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih dan sanitasi. Termasuk dalam program harapan keluarga (PKH). Bantuan operasional sekolah, program bantuan siswa miskin (BSM). Jamkesmas, dan program raskin. Program PKH adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM).

b. Penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Bertujuan untuk mengembangkan potensi dan kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan. Termasuk dalam kluster ini yaitu PNPM, P2SPP, serta perluasan dan pengembangan kesempatan kerja/padat.

c. Penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro kecil.

Bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha mikro kecil, yang sama sekali tidak memiliki sumber pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan.

1. Program Penanggulangan Kemiskinan PKH, KMS

a. PKH (Program Keluarga Harapan)

Program keluarga harapan (PKH) merupakan skema perlindungan sosial bagi rumah tangga sangat miskin untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan kajian ini menemukan berbagai bukti awal tentang perubahan relasi gender baik ditingkat domestik maupun publik. (Rosita, 2015 : 8).

Program keluarga harapan (PKH) adalah CCT (*conditional cash transfer*) yang diselenggarakan di Indonesia. Program yang banyak mengacu kepada pengalaman. Syarat yang diterapkan dalam program ini merupakan bentuk intervensi untuk membidik masalah kesejahteraan dan kesenjangan gender dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu program PKH bantuan dana tunai diberikan kepada ibu atau perempuan dewasa yang disebut pengurus keluarga.

b. KMS (kartu menuju sejahtera)

KMS merupakan program intervensi dari pemerintah untuk warga kurang mampu sehingga dapat memperoleh berbagai jaminan dari pemerintah daerah, seperti jaminan kesehatan dan pendidikan, KMS berfungsi sebagai identitas untuk penyaluran beasiswa bagi siswa yang tidak mampu dan layanan jaminan kesehatan, maupun untuk mempermudah memberikan berbagai bantuan dari pemerintah daerah seperti beras miskin.

Kemiskinan merupakan persoalan yang sangat kompleks dan kronis, maka cara penanggulangan kemiskinan pun membutuhkan analisis yang tepat, melibatkan semua komponen permasalahan, dan diperlukan strategi penanganan yang tepat, berkelanjutan dan tidak bersifat temporer.

Upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan penyediaan kebutuhan dasar seperti pangan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan pertanian, pemberian dana bergulir melalui sistem kredit, pembangunan prasarana dan pendampingan, penyuluhan sanitasi dan sebagainya,. Dari serangkaian cara dan strategi



penanggulangan kemiskinan tersebut, semuanya berorientasi material, sehingga berkelanjutan sangat tergantung pada ketersediaan anggaran dan komitmen pemerintah. Di pendamping itu, tidak adanya tatanan pemerintahan yang demokratis menyebabkan rendahnya akseptabilitas dan inisiatif masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan dengan cara mereka sendiri.

Program-program penanggulangan kemiskinan sudah banyak dilaksanakan berbagai negara. Sebagai perbandingan, di negara Semerika serikat program penangulanga kemiskinan diarahkan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi antar negara bagian, memperbaiki kondisi pemukiman perkotaan dan pendesaan, perluasan kesempatan pendidikan dan kerja untuk para pemuda, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi orang dewasa, dan pemberian bantuan kepada kaum miskin usia lanjut. Selain program pemerintah juga kalangan masyarakt ikut terlibat membantu kaum miskin melalui organisasi kemasyarakatan, gereja, dan sebahainya. Sedangkan di negara indonesia sebenarnya dari uraian di atas juga melakukan upaya yang hampir sama seperti yang dilakukan di Amerika Serikat, mungkin tingkat komprehensifitasnya yang masih diperlukan. Penanganan kemiskinan di indonesia masih didominasi sektor ekonomi, belum begitu menyentuh aspek lain seperti sosial, budaya, hukum dan politik, bahkan agama.

Ada beberapa Kriteria masyarakat miskin yang terjadi antara lain :

1. Jenis tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan
2. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kau berkualitas rendah/tembok tanpa diplester
3. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama rumah tangga lain
4. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik
5. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindungi/sungai/air hujan
6. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah
7. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
8. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan dipuskesmas/poliklinik
9. Sumber penghasilan rumah tangga adalah petani
10. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual

2.7 Kerangka Pemikiran

Menurut Supto Haryoko (dalam sugiyono 2017 : 66), kerangka pemikiran adalah suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dua atau lebih secara mandiri maka, yang dilakukan peneliti disamping argumentasi terhadap variasi-variasi yang diteliti.

Adapun kerangka pemikiran yang penulis kembangkan dalam penelitian adalah

Gambar 2.1: Kerangka pememikiran

Indikator

1. Pertumbuhan Ekonomi
2. Jumlah Penduduk
3. Pengangguran
4. Tingkat pendidikan
5. Angka harapan hidup

(Sumber. Simon Kusnetz dan Todaro, 2004)

2.8 Hipotesis



Berdasarkan latar belakang masalah dan kajian diatas hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu ” Diduga pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan, pengangguran, jumlah penduduk, dan angka harapan hidup berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di desa mudik ulo kecamatan hulu kuantan kabupaten kuantan singingi masih terbilang kurang baik.

2.9 Definisi Operasional

Adalah suatu sistem yang dibuat sedemikian rupa untuk mengatur proses pengelolaan organisasi masyarakat sehingga dapat berjalan dengan baik.

- a) Pertumbuhan Ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya yang ditentukan oleh adanya kemajuan dan teknologi.
- b) pengangguran adalah keadaan ketika seseorang yang tidak bekerja dan yang secara aktif sedang dalam masa mencari pekerjaan.
- c) jumlah penduduk adalah jumlah penduduk dalam pembangunan ekonomi suatu daerah merupakan permasalahan mendasar, karena pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembangunan ekonomi.
- d) tingkat pendidikan adalah pendidikan memainkan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara untuk menyerap teknologi dan untuk mengembangkan kapasitas agar terciptanya pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan.
- e) angka harapan hidup adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur.

3. Jenis Penelitian

Penelitian yang dipakai dalam penelitian ini survey tingkat Deskriptif kuantitatif. Dengan menggunakan observasi dan wawancara untuk menganalisis dan menguraikan kondisi tentang Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di desa Mudik Ulo Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah untuk meneliti pada populasi, atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistic, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2012 : 8)

Berdasarkan teori tersebut, penelitian deskriptif kuantitatif merupakan data yang diperoleh dari sampel populasi penelitian dianalisis dengan metode statistic yang digunakan. Penelitian deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana Implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Desa Mudik Ulo Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.

3.1 Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi adalah wilayah yang terdiri atas proyek dan subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015 : 80).

Jumlah penduduk di Desa Mudik Ulo Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi adalah 696 orang dari 199 KK.



Populasi dan sampel jenuh (Sampel sensus) Populasi dan sampel dalam suatu penelitian yang dilakukan benar-benar mendapatkan data sesuai yang diharapkan.

b) Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2015 : 81). Teknik penarikan sampel untuk unsur tenaga medis maka penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relative kecil, dan unsur data penanggulangan kemiskinan *Simple Random Sampling*, yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu (Sugiyono, 2015 : 82).

$$\text{Rumus Slovin : } n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

Dimana n : Jumlah sampel

N = Populasi

E = Persepsi akibat kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditolerir (15% = 0,15)

Dan rumus slovin di atas, maka sampel dari peneliti ini adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

$$n = \frac{696}{1+696(0,15)^2}$$

$$n = \frac{696}{16,66}$$

$$n = 41,776710684273$$

$$n = 42 \text{ responden (digenapkan)}$$

c) Sumber data

Adapun sumber data yang penulis perlukan adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber data utama yang berupa tindakan-tindakan sosial dan kata-kata dari pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti. Sehingga penulis dapat diperoleh hasil sebenarnya dari obyek yang diteliti melalui informan dan pihak-pihak tertentu. Data ini diperoleh dari informasi melalui wawancara mendalam kemiskinan kantor desa yang berkaitan dengan Implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di desa mudik ulo kecamatan hulu kuantan kabupaten kuantan singingi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari bahan kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, Koran, majalah internet serta dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan subyek penelitian. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian dengan memanfaatkan data yang telah ada pada kantor desa mudik ulo kecamatan hulu kuantan kabupaten kuantan singingi.

3.2 Lokasi Penelitian

Adapun Lokasi Penelitian Ini Adalah di Kantor Desa Mudik Ulo Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian karena di kantor desa tersebut dapat memberikan informasi tentang penanggulangan kemiskinan.



3.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang benar dan relevan dengan tujuan penelitian ini, maka penulis maka menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

a) Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden (Sugiyono, 2017 : 162)

b) Observasi

Observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan (Sugiyono, 2015 : 145)

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi. Dokumen dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial dan lainnya, (Irawan soehartono, 2015 : 70-71).

3.4 Metode Analisa Data

Semua data yang telah diperoleh dalam penelitian lalu dikumpulkan, selanjutnya dikelompokkan untuk dijadikan sebagai bahan masukan yang akan digunakan dalam melaksanakan penulisan ini. Setelah data terkumpul tentunya diberikan penjabaran terhadap data tersebut dengan menggunakan presentase. Untuk ini, dalam memberikan penganalisaan menggunakan teknik data kuantitatif yaitu data yang dijabarkan data kuantitatif kedalam bentuk angka-angka yang skor berdasarkan skala likert berikut :

| | | |
|----|---------------|---------------|
| SB | = Sangat baik | diberi skor 5 |
| B | = Baik | diberi skor 4 |
| CB | = Cukup Baik | diberi skor 3 |
| KB | = Kurang Baik | diberi skor 2 |
| TB | = Tidak Baik | diberi skor 1 |

Untuk menjabarkan data kuantitatif kedalam bentuk angka-angka tersebut, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Jumlah Total} = \text{Jawaban Responden} \times \text{Skor}$$

Setelah data diolah dan didapat hasilnya, untuk mengetahui hasil olahan data berada pada posisi dimana. Secara kontinum dapat digambarkan sebagai berikut :

| | | | | |
|-----------|-----|---------------|-----|-----|
| 51 | 102 | 153 | 204 | 225 |
| 00 – 51 | | = Tidak Baik | | |
| 55 – 102 | | = Kurang Baik | | |
| 103 – 153 | | = Cukup Baik | | |
| 154 – 204 | | = Baik | | |
| 205 – 225 | | = Sangat Baik | | |

Setelah data terkumpulnya, penulisan memisahkan data dan melaporkan data tersebut. menurut jenisnya dan disajikan dalam bentuk tabel frekuensi dan persentase. Dalam penelitian data analisa secara deskriptif kuantitatif yaitu memberikan gambaran secara umum mengenai



variable yang diteliti, dengan menganalisa secara seksama lalu menarik kesimpulan dan pada akhirnya memberikan saran – saran.

3.5 Analisi Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Desa Mudik Ulo Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi

Bab ini penelitian mengemukakan data penelitian yang merupakan hasil yang penulis dapatkan dilokasi penlitian, yaitu pada Desa Mudik Ulo kecamatan hulu kuantan kabupaten kuantan singingi, khususnya masalah yang menjelaskan tentang implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan didesa mudik ulo kecamatan hulu kuantan kabupaten kuantan singingi.

Data yang disajikan dalam tulisan ini, adalah data yang diperoleh berdasarkan kuesioner dan diisi oleh masyarakat miskin yang ada pada desa mudik ulo tersebut sebagai responden dan juga mengadakan pengamatan langsung pada lokasi penelitian guna mendapatkan data secara langsung yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Pada bab ini penulis menguraikan pembahasan serta teoritis maupun secara langsung dari objek penelitian. Adapun analisa dalam skripsi ini, penulis melakukan sesuai dengan kemampuan yang penulis miliki.

3.6 Upaya Yang Dilakukan Untuk Meningkatkan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Didesa Mudik Ulo Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi

Salah satu cara untuk menjaring aspirasi dari masyarakat dalam penyusunan rancangan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) sebagai masyarakat ,sekaliigus terlibat dalam pemerintahan level terbawah dipemerintah desar. Salah satu masalah besar yang dihadapi oleh desa dimudik ulo saat ini adalah cukup tingginya angka kemiskinan, baik kemiskinan struktural maupun kemiskinan kultural untuk mengikisnya trategi yang harus dilakukan adalah. Yang pertama : memaksimalkan dana desa untuk kegiatan yang terkait langsung dengan target penurunan angka kemiskinan didesa mudik ulo, seperti pembangunan sarana produksi, pengembangan pasar dan sejenisnya,

Yang kedua : memaksimalkan peran BUMDes sebagai penopang utama pendapatan ali desa, dan juga fokus kepda petani dan para pelaku UMKM sebagai bagian terbesar kelompok masyarakat yang ada didesa dan lain sebagainya.

4 Kesimpulan

Hasil sebaran kuesioner yang menentukan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan didesa mudik ulo kecamatan hulu kuantan kabupaten kuantan singingi yang menghasilkan rata-rata 170 berarti termasuk pada interval baik, serta observasi dilapangan yang menunjukkan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan didesa mudik ulo kecamatan hulu kuantan sudah berjalan dengan baik, terlihat dengan pertumbuhan ekonomi, pengangguran, jumlah penduduk, tingkat pendidikan dan angka harapan hidup yang terjadi pada masyarakat mudik ulo sesuai dengan indikator dan berjalan dengan sudah baik.

4.1 Saran

6.2.1 diharapkan kepada kepala desa mudik ulo untuk lebih memperhatikan masyarakat miskin yang ada didesa mudik ulo

6.2.2 memberikan motivasi terhadap remaja yang malas berkerja pada desa mudik ulo



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

6.2.3 agar penelitian ini lebih akurat dan mendapatkan hasil yang lebih baik diharapkan ada penelitian lanjutan dan yang lebih monplek dalam membahas kemiskinan didesa mudik ulo.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Banga, Wempy. 2018, *Kajian Administrasi Kontemporer*, Yogyakarta : Gava Media.
- Basuki, Johannes. 2018, *Administrasi Publik*, Depok : PT Raja Grafindo.
- Gunawan, Imam. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Praktek*, Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Indradi, Syamsuddin, Sjamsiar. 2016, *Dasar-dasar dan Teori Administrasi Publik*, Malang : Intrans Publising.
- Pasolong, Harbani. 2017, *Teori Administrasi Publik*, Badung : Alyabeta.
- Purwanto, Agus, Erwan, 2015, *Implementasi Kebijakan Publik*, Yogyakarta ; Gava Media.
- Rawita, Ino Sutisno. 2013. *Kebijakan Pendidikan: Teori, Implementasi, dan Monev*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta.
- Rusdiana, Ahmad. 2015. *Kebijakan Pendidikan: Dari Filosofi Ke Implementasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sarwono, Jonathan. 2013. *Strategi Melakukan Riset: Kuantitatif, Kualitatif, Gabungan*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Stamboel, Kemal 2012. *Panggilan Keberpihakan: Strategi Mengakhiri Kemiskinan Di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Subarsono, 2013. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiono, 2015. *Metode Penilitin Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Taher, Arifin, 2015, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Bandung : Alfabeta.
- Tahier Rohana dn Makmur, 2017, *Kerangka Teori dan Ilmu Administrasi Negara*, Depok : Raja Grafindo.
- Wahab, Abdul Solichin, 2017, *Analisis Kebijakan*, Jakarta : PT Bumi Aksara